

# DUKUNGAN SISTEM PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH MENENGAH KECAMATAN SEKAMPUNG

By

Wita Febritus (wita\_febritus@yahoo.com)<sup>1</sup>  
Syarifuddin Dahlan.<sup>2</sup>  
Muswardi Rosra.<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*The purpose of this research was to describe aspects of the guidance and counseling support system. This research is using survey method, with interviews and observations as data collection techniques. The sources are 24 counselor. Data analysis technique use percentage descriptive. The results are the guidance and counseling support system is a collaboration counselor with teacher for the study in the handling of students who have trouble learning (87,5%), collaboration counselor with the parents of students in order to data collection of students learning activities at home (87,5%), collaboration counselor with psychologist to the psychological tests (0%), counselor activeness teacher in ABKIN (41,7%), the special room of guidance and counseling (11.1%), an instrument of AUM (41,7%), complete counseling program documents (50%), technical supporting that is computer (62,5%), the allocation of funds for home visit (54,2%), and scheduled time allocation is 1 hours/sunday/classes for guidance class. (16,7%).*

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan aspek-aspek dukungan sistem penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Menggunakan metode survey, dengan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Informannya 24 orang guru BK. Teknik analisis data menggunakan deskriptif persentase. Hasilnya, aspek-aspek dukungan sistem adalah kolaborasi guru BK dengan wali kelas/guru bidang studi dalam penanganan siswa yang memiliki prestasi belajar rendah (87,5%), kolaborasi guru BK dengan orang tua siswa dalam rangka pengumpulan data kegiatan belajar siswa di rumah (87,5%), kolaborasi guru BK dengan psikolog untuk pengadaan tes psikologi (0%), keaktifan guru BK dalam ABKIN (41,7%), adanya ruang khusus BK (11,1%), instrumen pengumpul data AUM (41,7%), dokumen program BK lengkap (50%), penunjang teknis komputer (62,5%), alokasi dana untuk *home visit* (54,2%) dan alokasi waktu terjadwal 1 jam pelajaran/minggu/kelas untuk bimbingan klasikal (16,7%).

**Kata kunci:** bimbingan dan konseling, dukungan sistem, penyelenggaraan

*1 Mahasiswa Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Lampung*

*2.Dosen Pembimbing Utama Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Lampung*

*3.Dosen Pembimbing Pembantu Bimbingan dan Konseling FKP Universitas Lampung*

## **PENDAHULUAN**

Tujuan pendidikan yang bukan hanya mengedepankan aspek akademis-intelektual namun juga aspek pribadi, sosial dan sistem nilai tentu tidak cukup diperoleh hanya dengan mengandalkan pada pelayanan yang bersifat instruksional yakni melalui kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, namun juga harus disertai dengan pendekatan lain yang bersifat interpersonal seperti bimbingan dan konseling. Perspektif optimalisasi dan keutuhan dalam memperkembangkan diri individu atau siswa sebagai insan yang dididik melalui intervensi pendidikan formal, menjadi dasar esensi dan relevansi keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia ditempatkan sebagai bantuan kepada peserta didik untuk dapat menemukan pribadi, dan mengembangkan potensi diri agar peserta didik dapat merencanakan masa depannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Prayitno dan Emran Amti (dalam Hikmawati 2010: 65) mengenai tujuan bimbingan dan konseling sebagai berikut.

“Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.”

Dalam pelaksanaannya, bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan cara dan strategi yang sangat berbeda dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan melalui pelayanan dasar, pelayanan responsif, perencanaan individual dan dukungan sistem. Pelayanan dasar, responsif dan perencanaan individual merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik secara langsung, sedangkan dukungan sistem merupakan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan layanan-layanan langsung tersebut.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aspek-aspek dukungan sistem dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah menengah Kecamatan Sekampung tahun pelajaran 2012/2013.

## **Dukungan Sistem Bimbingan dan Konseling**

Program bimbingan dan konseling komprehensif mengandung empat komponen pelayanan, yaitu pelayanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Mengenai dukungan sistem Nurihsan (2009: 47) menyatakan:

“Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara serta meningkatkan program bimbingan. Komponen dukungan sistem membantu staf atau personel bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar bimbingan, responsif dan perencanaan individual.”

Berdasarkan hal tersebut dukungan sistem merupakan salah satu bentuk strategi dalam implementasi program bimbingan dan konseling yang secara tidak langsung memberikan bantuan atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli, dengan cara memperlancar penyelenggaraan layanan dasar, responsif, dan perencanaan individual.

Dukungan sistem penyelenggaraan bimbingan dan konseling menurut Yusuf (2006: 74) meliputi dua aspek, yang terdiri dari :

1. Pemberian layanan konsultasi/kolaborasi  
Pemberian layanan ini menyangkut kegiatan guru pembimbing yang meliputi (1) kolaborasi dengan guru-guru, (2) menyelenggarakan program kerja sama dengan orang tua siswa atau masyarakat, (3) berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, (4) bekerjasama dengan personel sekolah lainnya dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa (5) melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling
2. Kegiatan manajemen  
Kegiatan manajemen ini merupakan upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan (1) pengembangan program, (2) pengembangan staf, (3) pemanfaatan sumber daya, dan (4) pengembangan penataan kebijakan.

Dengan demikian dukungan sistem dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling meliputi dua aspek kegiatan. Pertama, aspek pengembangan jejaring atau *networking* yang dilakukan melalui kolaborasi dengan personel sekolah khususnya guru bidang studi dan wali kelas, kolaborasi dengan orang tua siswa dan kolaborasi dengan ahli lain terkait dengan kegiatan bimbingan dan konseling. Kedua, aspek manajemen yang dilakukan melalui pengembangan staf, penyediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling, dan penataan kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey. Prasetyo (2012:143) menyatakan penelitian survey merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan sistematis yang sama kepada banyak orang untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah dan dianalisis.

### **Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah seluruh guru bimbingan dan konseling yang berada di sekolah menengah Kecamatan Sekampung sebanyak 24 orang.

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data di lapangan, peneliti menggunakan metode wawancara. Esterberg dalam Sugiyono (2010: 317) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data mengenai aspek dukungan sistem berupa kolaborasi guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas dan guru bidang studi, orang tua siswa dan psikolog, keaktifan guru bimbingan dan konseling dalam organisasi profesi ABKIN, alokasi dana untuk kegiatan *home visit*, dan alokasi waktu secara terjadwal untuk layanan bimbingan klasikal.

Selain wawancara, pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode observasi. Fathoni (2011:104) menyatakan observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi dilakukan untuk mengetahui aspek sarana dan prasarana bimbingan dan konseling (ruang bimbingan dan konseling, dokumen program, instrumen pengumpul data AUM umum, dan perlengkapan penunjang teknis berupa komputer).

### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan dengan cara pemberian pendapat oleh ahli (*judgmen experts*). Dalam hal ini setelah instrumen

dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli untuk meminta pendapat atau *judgmennya*. Jumlah tenaga ahli yang digunakan adalah tiga orang ahli.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif persentase menggunakan rumus persentase menurut Sudijono (2005:43) berikut ini :

P : Persentase  
f : Frekuensi  
N : Jumlah informan  
100% : Ketetapan

Keterangan :

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aspek-aspek dukungan sistem bimbingan dan konseling di sekolah menengah Kecamatan Sekampung adalah sebagai berikut:

### **Keterangan :**

- A. Kolaborasi guru BK dengan wali kelas/guru bidang studi dalam menangani masalah rendahnya prestasi belajar siswa
- B. Kolaborasi guru BK dengan orang tua siswa dalam rangka pengumpulan data kegiatan belajar siswa di rumah
- C. Kolaborasi guru BK dengan psikolog untuk mengadakan tes psikologi
- D. Keaktifan guru BK dalam ABKIN
- E. Ruang khusus bimbingan dan konseling
- F. Dokumen program bimbingan dan konseling
- G. Instrumen pengumpul data AUM umum
- H. Perlengkapan penunjang teknis berupa komputer
- I. Alokasi dana untuk kegiatan *home visit*
- J. Jam terjadwal untuk layanan bimbingan klasikal

Gambar 1. Persentase aspek-aspek dukungan sistem bimbingan dan konseling

Berdasarkan gambar di atas, sebagian besar guru bimbingan dan konseling (87,5%) telah berkolaborasi dengan guru bidang studi dan wali kelas dalam mengatasi siswa yang memiliki prestasi belajar rendah. Bentuk kolaborasi ini sesuai dengan yang dikemukakan Yusuf (2006:76) berikut ini :

“Guru BK berkolaborasi dengan guru/wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa (seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya), membantu memecahkan masalah siswa, dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran/wali kelas.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu bentuk kolaborasi guru bimbingan dan konseling dengan wali kelas dan guru bidang studi adalah dalam rangka memperoleh informasi tentang prestasi belajar siswa, termasuk prestasi belajar siswa yang rendah. Rendahnya prestasi belajar siswa tidak dapat diidentifikasi secara totalitas oleh guru. Selain karena guru sudah disibukkan dengan tugas mengajar dan menyusun perangkat pembelajaran, rendahnya prestasi belajar tidak semata-mata disebabkan oleh faktor akademis melainkan dapat pula disebabkan oleh faktor psikologis seperti malas belajar, kurang minat dan perhatian, kekurangan sarana belajar, kekurangan waktu belajar, suasana sosio-emosional di rumah kurang memungkinkan untuk belajar dengan baik, atau proses belajar mengajar di sekolah kurang menyenangkan dan lain sebagainya. Salah satu kelebihan seorang guru bimbingan dan konseling adalah memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis karakter, tabiat serta psikologis secara khusus, sehingga kolaborasi antara guru bimbingan dan konseling dengan guru bidang studi dan wali kelas ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah belajar, sehingga masalah siswa yang memiliki prestasi belajar yang rendah dapat segera ditangani. Sedangkan 12,5% guru bimbingan dan konseling lainnya tidak melakukan kolaborasi ini, disebabkan adanya asumsi dari guru bidang studi dan wali kelas atau bahkan dari guru bimbingan dan konseling sendiri bahwa kegiatan belajar sepenuhnya merupakan kawasan guru, sehingga bimbingan dan konseling tidak perlu terlibat atau ikut campur dalam penanganan masalah yang ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar.

Selanjutnya, sebagian besar guru bimbingan dan konseling (87,5%) telah berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam rangka pengumpulan data kegiatan belajar siswa di rumah, baik menggunakan angket maupun dengan mengundang orang tua siswa datang langsung ke sekolah. Hal ini selaras dengan yang disebutkan dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 berikut :

“(1) kepala sekolah/madrasah atau komite sekolah/madrasah mengundang para orang tua untuk datang ke sekolah (minimal satu semester satu kali), yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pembagian rapor, (2) sekolah/madrasah memberikan informasi kepada orang tua (melalui surat) tentang kemajuan belajar atau masalah peserta didik, dan (3) orang tua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke sekolah/madrasah menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-harinya.”

Berdasarkan hal di atas, guru bimbingan dan konseling berkolaborasi dengan orang tua siswa salah satunya untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan belajar siswa di rumah. Dalam hal ini guru bimbingan dan konseling berupaya untuk menyediakan data kegiatan belajar siswa dalam kualitas yang baik dan lengkap untuk menunjang pelaksanaan layanan bimbingan. Melalui kolaborasi ini orang tua dan guru bimbingan dan konseling dapat saling memberi informasi, pengertian, dan tukar pikiran terkait dengan kegiatan belajar siswa, sehingga perkembangan belajar siswa dapat diketahui, untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan jika kegiatan belajar siswa dinilai kurang atau tidak baik dan dilakukan upaya peningkatan jika kegiatan belajar siswa dinilai sudah baik. Sedangkan 12,5% guru bimbingan dan konseling lainnya tidak melakukan kolaborasi ini disebabkan adanya asumsi dari guru bimbingan dan konseling bahwa kegiatan belajar sepenuhnya kawasan guru bidang studi, sehingga pengumpulan data kegiatan belajar siswa di rumah merupakan tanggung jawab guru bidang studi.

Selain berkolaborasi dengan wali kelas, guru bidang studi dan orang tua siswa, guru bimbingan dan konseling perlu menjalin kerjasama dengan pihak atau instansi di luar sekolah. Supriatna (2011:74) menyebutkan:

“Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah dapat dilakukan seperti dengan instansi pemerintah, instansi swasta, para ahli dalam bidang tertentu, seperti psikolog, psikiater, dan dokter, MGP (Musyawarah Guru Pembimbing), dan depnaker (dalam rangka analisis bursa kerja/lapangan pekerjaan).”

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa psikolog adalah salah satu pihak di luar sekolah yang dapat diajak bekerjasama terkait dengan program bimbingan dan konseling untuk pengadaan tes psikologi seperti pengadaan tes IQ, kepribadian, bakat dan minat dan sebagainya. Namun sayangnya belum ada satupun guru bimbingan dan konseling (0%) yang sudah menjalin kolaborasi ini. Padahal hasil tes psikologi dapat dijadikan sebagai bahan acuan pengembangan

diri siswa baik dalam kegiatan belajar, kegiatan ekstra dan intra kurikuler. Belum terjalannya kolaborasi ini disebabkan mahalanya biaya untuk pengadaan tes psikologi tersebut. Biaya pengadaan tes psikologi dapat mencapai ratusan ribu rupiah jika dibebankan kepada setiap anak, dimana nominal tersebut dianggap cukup berat bagi orang tua siswa, sedangkan jika dibebankan pada pihak sekolah, pihak sekolahh juga belum mampu untuk menanggungnya.

Pengembangan profesionalitas guru bimbingan dan konseling dilakukan dengan cara aktif dalam organisasi profesi ABKIN, hal ini sudah dilakukan oleh 41,7% guru bimbingan dan konseling. Hal ini sesuai dengan pernyataan Supriatna (2011:74) bahwa :

“Pengembangan profesional guru bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui (a) *in-service training*, (b) aktif dalam organisasi profesi, (c) aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah; seperti seminar dan workshop (lokakarya), atau (d) melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Pascasarjana).”

Berdasarkan pernyataan Supriatna tersebut, pengembangan profesionalitas guru bimbingan dan konseling salah satunya dapat dilakukan dengan cara aktif dalam organisasi profesi (ABKIN). Pengembangan profesionalitas wajib diupayakan oleh semua guru bimbingan dan konseling, terlebih bagi yang belum berkualifikasi akademik konselor. ABKIN sebagai organisasi yang melindungi para praktisi bimbingan dan konseling senantiasa melakukan peningkatan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling melalui berbagai upaya mulai dari asesmen, penyusunan program, dan pemberian layanan dan juga melakukan kegiatan pendukung seperti penilaian layanan serta penelitian tindakan bimbingan dan konseling melalui seminar dan lokakarya, juga mengadakan pendidikan dan latian bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi. Untuk itu aktif dalam ABKIN sangat penting untuk menambah dan meng-*update* wawasan, pengetahuan, dan keterampilan guru bimbingan dan konseling. Namun guru bimbingan dan konseling yang belum aktif dalam ABKIN justru lebih banyak yaitu 58,3%. Mereka adalah guru bidang studi yang mendapat tambahan tugas sebagai guru bimbingan dan konseling sehingga merasa tidak perlu melakukan upaya pengembangan profesionalitas bimbingan dan konseling sebab tugas sebagai guru bimbingan dan konseling hanya tugas sampingan bagi mereka.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan hanya 11,1% sekolah yang memiliki ruang bimbingan dan konseling yang sudah terpisah dari ruangan lain. Itupun ruang bimbingan dan konseling hanya memiliki satu ruangan yang difungsikan untuk menampung segala kegiatan yang memungkinkan dilakukan di dalamnya seperti untuk ruang kerja, ruang tamu, ruang konseling individual dan lain-lain. Kemudian 33,3% telah memiliki ruang bimbingan dan konseling namun masih bercampur dengan ruangan lain seperti ruang waka kesiswaan, dan ruang UKS bahkan tanpa penyekat. Sedangkan sekolah yang belum memiliki ruang khusus bimbingan dan konseling persentasenya paling tinggi yaitu 55,6%. Guru bimbingan dan konseling di sekolah ini bekerja di ruang guru, sebab mereka memang merupakan guru bidang studi yang diberi tambahan tugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 yang menyebutkan bahwa bimbingan dan konseling membutuhkan ruangan seperti :

1. ruang kerja
2. ruang administrasi/ data
3. ruang konseling individual
4. ruang bimbingan dan konseling kelompok
5. ruang biblio terapi
6. ruang relaksasi/desensitisasi
7. ruang tamu

Dengan demikian, belum ada satupun sekolah menengah di Kecamatan Sekampung yang telah memiliki jumlah dan jenis ruangan bimbingan dan konseling seperti yang distandarkan oleh ABKIN. ABKIN menghendaki adanya jumlah ruangan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan layanan khususnya ruang untuk pengadaan konseling. Ruang konseling seharusnya dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik. Bagaimana mungkin seorang siswa yang melakukan konseling dapat dengan nyaman menceritakan kesulitan-kesulitan atau hal-hal yang bersifat pribadi jika ruang bimbingan dan konselingsnya bercampur dengan ruangan lain, terlebih jika berada di dalam kantor guru, ruang perpustakaan, atau ruang UKS yang terkadang hanya menggunakan hordeng sebagai pemisah ruangan atau bahkan tanpa penyekat sama

sekali, sehingga apa yang siswa ceritakan bisa didengar oleh siapa saja yang berada di sekitar ruangan tersebut. Tentu saja kondisi seperti ini sangat tidak baik bagi psikologis siswa yang bersangkutan.

Mengenai program, hasil observasi menunjukkan bahwa sudah ada 50% guru bimbingan dan konseling yang memiliki dokumen program dengan lengkap (program tahunan, semester, bulanan, mingguan dan harian). Hal ini sesuai dengan Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 yang menyebutkan :

“Bimbingan dan konseling memerlukan fasilitas-fasilitas untuk menunjang penyelenggaraannya, diantaranya dokumen program bimbingan dan konseling (buku program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan dan program harian).”

Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa dalam menjalankan kegiatan bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling memerlukan program. Selain sebagai acuan agar kegiatan bimbingan dan konseling berjalan dengan teratur dan lancar, adanya program bimbingan dan konseling juga mempermudah guru bimbingan dan konseling untuk mengevaluasi dan mengontrol kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling yang sudah dilaksanakannya, kegiatan mana yang sudah berhasil dan kegiatan mana yang belum. Kemudian sebanyak 12,5% guru bimbingan dan konseling hanya memiliki program tahunan dan semester. Namun program itu tidak mereka buat sendiri melainkan didapatkan dari rekan guru bimbingan dan konseling mereka dari sekolah lain. Sedangkan 37,5% guru bimbingan dan konseling lainnya tidak memiliki program, mereka menjalankan bimbingan dan konseling tanpa program, semua kegiatan bimbingan dan konseling berjalan secara insidental saja, dan tidak dievaluasi.

Untuk instrumen berupa AUM umum, guru bimbingan dan konseling yang sudah memiliki instrumen tersebut persentasenya lebih sedikit (41,7%) dibandingkan dengan guru bimbingan dan konseling yang belum memiliki (58,3%). Bimbingan dan konseling memerlukan instrumen pengumpul data seperti yang disebutkan dalam Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 berikut :

“Alat pengumpul data teknik non-tes yaitu: biodata konseli, pedoman wawancara, pedoman observasi (seperti pedoman observasi dalam kegiatan pembelajaran, pedoman observasi dalam bimbingan dan konseling kelompok), catatan anekdot, daftar cek, skala penilaian, angket (angket konseli dan orang tua), biografi dan autobiografi, sosiometri, AUM, ITP.”

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa AUM merupakan salah satu jenis instrumen non tes dalam bimbingan dan konseling. AUM umum merupakan sebuah instrumen standar yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperkirakan masalah-masalah yang dihadapi siswa. AUM atau alat ungkap masalah ini didesain untuk mengungkap sepuluh bidang masalah yang mungkin dihadapi siswa yaitu masalah jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai, dan moral, hubungan muda-mudi, keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan waktu senggang. Kesepuluh bidang masalah tersebut merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi oleh siswa. Adanya instrumen ini dimanfaatkan oleh guru bimbingan dan konseling untuk mengungkap dan mengidentifikasi masalah-masalah umum yang terjadi pada siswa tersebut, sehingga permasalahan siswa dapat dicarikan solusinya dan segera diselesaikan. Sementara informan yang belum memiliki AUM umum disebabkan mereka tidak tau adanya jenis instrumen ini. Selain karena bukan asli guru bimbingan dan konseling, mereka juga tidak aktif dalam organisasi profesi ABKIN.

Perlengkapan penunjang teknis, khususnya komputer memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung dan mempermudah pekerjaan guru bimbingan dan konseling. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling (62,5%) berinisiatif menggunakan laptop pribadinya untuk melengkapi keperluan penunjang teknis berupa komputer meskipun pihak sekolah belum menyediakannya. Di dalam Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007 disebutkan bahwa salah satu perlengkapan penunjang teknis bimbingan dan konseling adalah perangkat elektronik (seperti komputer, tape recorder, film, dan CD interaktif, CD pembelajaran, OHP, LCD, TV). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa bimbingan dan konseling membutuhkan perlengkapan elektronik berupa komputer. Dalam kerangka pikir

dan kerangka kerja bimbingan dan konseling terkini, guru bimbingan dan konseling sangat memerlukan komputer dan perlu terampil menggunakan perangkat komputer untuk membantu mengumpulkan data, mengolah data, menampilkan data maupun memaknai data sehingga dapat diakses secara cepat dan interaktif. Untuk itu sudah seharusnya ada perangkat komputer untuk menunjang program kerja guru bimbingan dan konseling. Sedangkan 37,5% guru bimbingan dan konseling lainnya belum memiliki perangkat komputer ini. Pihak sekolah memang belum secara khusus menyediakan komputer untuk bimbingan dan konseling, sehingga jika ada keperluan guru bimbingan dan konseling menggunakan komputer milik staf tata usaha.

Perencanaan anggaran merupakan aspek penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling (54,2%) mengatakan bahwa sekolah mereka telah menyediakan alokasi dana khusus untuk pelaksanaan *home visit*. Anggaran ini masuk ke dalam anggaran dan belanja sekolah. Hal ini sesuai dengan Rambu-Rambu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik ABKIN) tahun 2007, yang menyebutkan bahwa :

”Bimbingan dan konseling memerlukan komponen anggaran dana untuk aktivitas pendukung (seperti untuk *home visit*, pembelian buku pendukung/ sumber bacaan, mengikuti seminar/*workshop* atau kegiatan profesi dan organisasi profesi, pengembangan staf, penyelenggaraan MGBK, pembelian alat/ media untuk pelayanan bimbingan dan konseling).”

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa salah satu komponen anggaran dana yang harus disediakan oleh sekolah untuk bimbingan dan konseling adalah anggaran untuk aktivitas pendukung salah satunya adalah untuk *home visit*. Adanya alokasi dana merupakan hal yang sangat penting sebab untuk melakukan *home visit* guru bimbingan dan konseling harus datang atau mengunjungi rumah siswa yang bisa jadi jaraknya tidak dekat dengan lingkungan sekolah, sehingga membutuhkan dana untuk transportasi. Sedangkan sebanyak 45,8% guru bimbingan dan konseling lainnya mengatakan hal yang sebaliknya, yakni sekolah mereka belum menyediakan alokasi dana khusus untuk pelaksanaan *home visit*. Untuk melakukan *home visit* guru bimbingan dan konseling ini menggunakan

dana pribadinya, sehingga terkadang kegiatan *home visit* harus ditunda jika guru bimbingan dan konseling belum memiliki dana.

Salah satu kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang harus dilakukan secara tatap muka, di dalam jam pembelajaran dan terjadwal adalah layanan bimbingan kelas atau klasikal. Namun hasil penelitian justru menunjukkan sebagian besar (83,3%) guru bimbingan dan konseling menyatakan tidak ada alokasi waktu terjadwal untuk layanan bimbingan klasikal, sehingga untuk melaksanakan layanan ini guru bimbingan dan konseling harus selalu mencari waktu luang seperti jam kosong saat guru bidang studi tidak masuk. Dan hanya 16,7% guru bimbingan dan konseling yang menyatakan telah mendapat alokasi waktu secara terjadwal untuk kegiatan bimbingan klasikal, itu pun volume waktu yang disediakan hanya satu jam pelajaran setiap minggu per kelasnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Model dan Contoh Pengembangan Diri SMP, SMA, dan SMK yang diterbitkan oleh badan penelitian dan pengembangan Depdiknas tahun 2007 yang menyatakan bahwa “volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal.”

Agar layanan bimbingan dan konseling dapat terlaksana secara efektif dan efisien maka diperlukan pengaturan waktu, tujuannya tentu agar tidak saling mengganggu dengan kegiatan pengajaran maupun latihan. Pengaturan waktu secara terjadwal untuk masuk kelas merupakan salah satu pengaturan waktu yang cukup penting bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Dengan adanya waktu atau jam secara terjadwal untuk masuk kelas, bimbingan dan konseling akan lebih mudah dikenal terutama oleh siswa. Hal ini berarti pengaturan waktu atau jam secara terjadwal untuk masuk kelas akan membantu proses sosialisasi bimbingan dan konseling pada peserta didik yang nantinya diharapkan akan semakin banyak siswa yang memanfaatkan berbagai layanan bimbingan dan konseling. Sebaliknya, jika tidak ada waktu atau jam bimbingan dan konseling secara terjadwal untuk masuk kelas maka sosialisasi bimbingan dan konseling kepada siswa tidak dapat dilakukan dengan mudah mengingat pengaturan waktu secara insidental sifatnya tidak menyeluruh kepada semua siswa dan pengaturan waktu di luar jam pelajaran cukup sulit dilakukan karena untuk jam pelajaran wajib saja sudah padat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Aspek-aspek dukungan sistem dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah menengah Kecamatan Sekampung adalah adanya kolaborasi guru BK dengan wali kelas/guru bidang studi dalam penanganan siswa yang mengalami prestasi belajar rendah (87,5%), kolaborasi guru BK dengan orang tua siswa dalam rangka pengumpulan data kegiatan belajar siswa di rumah (87,5%), kolaborasi guru bimbingan dan konseling dengan psikolog untuk pengadaan tes psikologi (0%), keaktifan guru BK dalam organisasi profesi ABKIN (41,7%), adanya ruang khusus BK (11,1%), instrumen pengumpul data AUM (41,7%), dokumen program BK lengkap (50%), penunjang teknis berupa komputer (62,5%), alokasi dana untuk *home visit* (54,2%) dan alokasi waktu terjadwal 1 jam pelajaran/minggu/kelas untuk layanan bimbingan klasikal (16,7%).

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Kepada guru BK agar berkolaborasi dengan psikolog untuk mengadakan tes psikologi, dan bagi guru BK yang belum berkolaborasi dengan wali kelas/guru bidang studi dalam menangani masalah rendahnya prestasi belajar siswa, belum berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam pengumpulan data kegiatan belajar siswa di rumah, belum aktif dalam ABKIN, belum memiliki instrumen berupa AUM, belum memiliki dokumen program BK lengkap, diharapkan dapat memenuhi kekurangan tersebut.
2. Kepada pihak sekolah agar mengalokasikan waktu terjadwal untuk bimbingan klasikal 2 jam pelajaran/minggu/kelas, dan bagi sekolah yang belum menyediakan komputer, belum memiliki ruang khusus BK, dan belum menyediakan dana untuk *home visit*, diharapkan dapat memenuhi kekurangan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. 2007. *Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Naskah Akademik)*. Bandung: ABKIN.
- Pusat Kurikulum. 2007. *Model dan Contoh Pengembangan Diri SMP, SMA, dan SMK*. Jakarta : Balitbang Depdiknas.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hikmawati, Fenti. 2010. *Bimbingan Konseling*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nurihsan, Ahmad Juntika. 2009. *Bimbingan & Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Prasetyo, Bambang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudijono, Anas. 2005. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, Mamat. 2011. *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, Syamsu. 2006. *Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah (SLTP dan SLTA)*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.